

Evaluasi Efektivitas Kerja Sama Bilateral di Wilayah Perbatasan: Studi Terhadap Peran Joint Police Cooperation Committee (JPCC) Polri–PDRM Dalam GBC Malindo Periode 2022–2024

Jhonri Franky Obriss Silaban*, Bagong Suyanto
Universitas Airlangga, Indonesia

Email: frankysilaban464@gmail.com*, bagong.suyanto@fisip.unair.ac.id

Abstrak

Perdagangan dan penyelundupan narkoba semakin marak terjadi di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya di wilayah perbatasan darat seperti Kalimantan Barat dan Sarawak. Aktivitas ilegal ini kerap dilakukan secara tersembunyi melalui operasi terselubung, sehingga menyulitkan upaya deteksi dan penindakan. Seiring waktu, peningkatan intensitas kejahatan narkoba lintas negara ini telah menjadi ancaman serius terhadap ketertiban umum dan keamanan manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mekanisme Joint Police Cooperation Committee (JPCC) dalam menangani kejahatan lintas batas, mengevaluasi implementasi program-program kerja sama bilateral POLRI–PDRM, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kerja sama keamanan perbatasan, dan merumuskan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas kerja sama bilateral di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik, laporan resmi pemerintah, media massa, serta publikasi relevan lainnya. Temuan penelitian menunjukkan implementasi berbagai program JPCC, seperti lokakarya bersama, pertemuan evaluatif, kegiatan penyuluhan masyarakat, dan kampanye edukatif yang dirancang untuk memperkuat koordinasi penegakan hukum dan menekan aktivitas narkoba di wilayah perbatasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun masih terdapat tantangan terkait harmonisasi hukum, integrasi teknologi informasi, dan koordinasi antarinstansi, JPCC memiliki peran strategis dan efektif dalam memperkuat kerja sama bilateral, meningkatkan stabilitas keamanan kawasan, dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui penciptaan lingkungan yang lebih aman dan kondusif untuk pembangunan sosial-ekonomi.

Kata Kunci: Kolaboratif, Kerangka Kebijakan, Narkoba Ilegal, Jaringan Distribusi Narkoba, Perdagangan Lintas Batas Tanpa Izin.

Abstract

Drug trafficking and smuggling are increasingly prevalent in the Indonesia–Malaysia border region, particularly in land border areas such as West Kalimantan and Sarawak. These illegal activities are often carried out covertly through covert operations, making detection and enforcement difficult. Over time, the increasing intensity of cross-border drug crimes has become a serious threat to public order and human security. This study aims to analyze the effectiveness of the Joint Police Cooperation Committee (JPCC) mechanism in addressing cross-border crime, evaluate the implementation of bilateral cooperation programs between the Indonesian National Police (POLRI) and the Royal Malaysian Police (PDRM), identify challenges and obstacles in the implementation of border security cooperation, and formulate recommendations for improving the effectiveness of bilateral cooperation in the future. This study uses a descriptive qualitative approach utilizing secondary data obtained from academic literature, official government reports, mass media, and other relevant publications. The findings of this study show the implementation of various JPCC programs, such as joint workshops, evaluative meetings, community outreach activities, and educational campaigns designed to strengthen law enforcement coordination and suppress narcotics activities in border areas. The study concludes that despite challenges related to legal harmonization, information technology integration, and inter-agency coordination, the JPCC plays a strategic and effective role in strengthening bilateral cooperation, enhancing regional security stability, and positively contributing to the well-being of border communities by creating a safer and more conducive environment for socio-economic development.

Keywords: Joint, Policy Framework, Illicit Drug, Narcotics Distribution Network, Unauthorized Cross-border Trade

*Correspondence Author: Jhonri Franky Obriss Silaban
Email: frankysilaban464@gmail.com



PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat telah mendorong peningkatan berbagai aktivitas ilegal lintas negara, seperti peredaran narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, pencucian uang, penyelundupan senjata, aksi terorisme, kejahatan ekonomi internasional, serta penyelundupan narkoba (Ardivitianto, 2015; Edylia Putri & Rizaldi, 2021; Puspita, 2023; Sujati, 2018; Wulandari et al., 2022). Modus operandi dalam praktik penyelundupan saat ini cenderung mengandalkan sistem yang lebih adaptif dan tersembunyi, di mana interaksi antara pelaku dan konsumen tidak lagi memerlukan pertemuan fisik secara langsung (Akbar et al., 2024; James & Proulx, 2016; Putra Y, 2021).

Sejak lahirnya konsep negara modern melalui Perjanjian Westphalia 1648, perbatasan memiliki fungsi strategis sebagai penanda kedaulatan sekaligus ruang interaksi antarnegara. Tidak hanya sebagai garis geografis, perbatasan merepresentasikan identitas dan otoritas negara. Dalam konteks hubungan bilateral, kerja sama lintas batas menjadi penting, terutama dalam menghadapi isu-isu transnasional seperti peredaran dan penyelundupan narkoba. Permasalahan ini menuntut respons melalui perjanjian bilateral guna menjaga stabilitas dan keamanan kawasan perbatasan (Amsir, 2021; Saputro, 2020; Setiawan & Risnandar, 2019; Situni, 2017; Zarisnov Arafat & Muhammad Gary Gagarin Akbar, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas batas yang berfokus pada pengendalian dan penanganan obat-obatan secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara seperti Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Keberadaan kawasan hutan yang luas di wilayah ini kerap dimanfaatkan sebagai jalur perlintasan tidak resmi di sepanjang perbatasan darat. Jalur-jalur tersebut menjadi titik rawan yang rentan terhadap berbagai aktivitas ilegal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah membangun sejumlah pos pengawasan dan meningkatkan intensitas penjagaan serta pengawasan di kawasan perbatasan.

Dikutip dari Grafik Strategi Pemerintah Cegah Penyelundupan Narkoba dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2014 hingga 2024, Terdapat tiga kemungkinan skenario dalam dinamika penyelundupan narkoba, yakni skenario peningkatan dan penurunan. Skenario peningkatan mencerminkan tren bertambahnya jumlah penyalahguna narkoba akibat tekanan yang semakin masif dari jaringan pengedar. Sebaliknya, skenario penurunan menggambarkan berkurangnya angka penyalahgunaan narkoba sebagai hasil dari penguatan peran aparat penegak hukum serta partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan secara menyeluruh (Herindrasti, 2018; Kurniawan. K, 2018; Lusita Sinta Herindrasti, 2018; Murtiwiidayanti, 2018). Data skenario tersebut juga menunjukkan kecenderungan peningkatan penggunaan narkoba di Indonesia.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan analisa komprehensif dari penelitian ini. Terdapat dua sumber penelitian terdahulu yang penulis gunakan. Pertama, yakni Mou antara Indonesia dengan Malaysia yang sebagaimana telah diatur dalam

“Memorandum of Understanding (MOU) between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic substances, Precursor, Hazardous Material and Enhancement of Police Cooperation”

Penelitian Adrian yang berjudul “Joint police Cooperation POLRI-PDRM sebagai Upaya Indonesia dan Malaysia dalam Menjaga Keamanan Perbatasan Periode 2015-2017.” menjelaskan pendekatan diplomasi dan strategi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam upaya menjaga keamanan wilayah perbatasan kedua negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kondisi umum kerja sama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya di kawasan perbatasan yang rentan terhadap kejahatan terorganisir lintas negara. Fokus utama dalam penelitian ini adalah bentuk kerja sama strategis melalui Joint Police Cooperation Committee (JPCC) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Polisi Diraja Malaysia (PDRM). Penelitian ini secara khusus menganalisis upaya serta efektivitas kerja sama bilateral tersebut dalam memberantas kejahatan transnasional di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Parkes berjudul "Border Management: The Line Between Internal and External Security" membahas berbagai tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal, yang berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan serta menimbulkan ketegangan geopolitik di suatu kawasan. Studi ini secara khusus menyoroti pengelolaan wilayah perbatasan sebagai salah satu faktor utama yang dapat menjadi sumber ketegangan geopolitik.

Dalam pertemuan ke-35 General Border Committee (GBC) pada 15 Desember 2006 di Jakarta, Menteri Pertahanan Indonesia, Prof. Dr. Juwono Sudarsono, menyatakan bahwa telah terjadi sekitar 70 insiden di perbatasan darat dan laut Indonesia–Malaysia sepanjang tahun tersebut. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan kapasitas keamanan. Sebagai wujud respons, kedua negara sepakat membentuk Joint Police Cooperation Committee (JPCC), kerja sama kepolisian bilateral yang difokuskan untuk menangani kejahatan lintas negara, terutama penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan. Kesepakatan ini diresmikan oleh Ketua GBC Malindo saat itu, yaitu Prof. Dr. Juwono Sudarsono sebagai perwakilan dari Indonesia dan Dato' Sri Mohd Najib Abdul Razak sebagai perwakilan dari Malaysia.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah (1) “Bagaimana Output atau luaran yang dihasilkan melalui analisis kerja sama POLRI-PDRM terkait penyelesaian kasus peredaran dan penyelundupan narkoba di Kalimantan Barat? Lalu (2) Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama bilateral melalui JPCC, baik dari segi regulasi, teknologi, maupun koordinasi antar instansi?; dan (3) Bagaimana dampak kerja sama JPCC POLRI – PDRM terhadap stabilitas keamanan dan kesejahteraan Masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia selama periode 2022-2024?

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian Security Arrangement in the Border Regions antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks lintas batas darat sebagai implementasi kerja sama melalui Joint Police Cooperation Committee (JPCC) Polri–PDRM. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bentuk kerja sama yang dilakukan kedua negara dalam menjaga keamanan perbatasan serta mengidentifikasi output atau luaran yang dihasilkan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan lintas negara seperti drug trafficking dan smuggling di wilayah perbatasan darat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Data yang

dihimpun bersifat kualitatif, sehingga analisis difokuskan pada makna, konteks, dan kualitas informasi yang diperoleh guna memungkinkan interpretasi yang komprehensif (Sumanto, 1995: 51). Penelitian ini memanfaatkan beragam sumber data, termasuk wawancara, catatan lapangan, dokumentasi visual seperti rekaman video dan foto, dokumen pribadi peneliti, serta referensi tertulis lainnya seperti jurnal ilmiah, buku, modul, majalah, surat kabar, media massa, dan sumber daring. Keberagaman data tersebut memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam dalam menjelaskan fenomena yang menjadi fokus kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Kapasitas dan Pengukuran Efektivitas

Rapat dan Kunjungan Timbal Balas

Kegiatan ini menekankan penguatan intensitas koordinasi dan hubungan strategis antara Indonesia dan Malaysia di kawasan perbatasan sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam memerangi kejahatan lintas negara, seperti peredaran dan penyelundupan narkoba. Pertemuan dan kunjungan timbal balik antara POLRI dan PDRM dilakukan secara rutin di berbagai tingkatan, mulai dari kerja sama lokal hingga forum nasional seperti General Border Committee (GBC) Malindo, yang diselenggarakan bergiliran. Forum-forum ini tidak hanya membahas strategi keamanan, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik melalui dialog, pertukaran informasi intelijen, dan perencanaan operasi bersama. Melalui program Joint Police Cooperation Committee (JPCC), kedua negara berhasil menyelenggarakan forum strategis tahunan yang berfokus pada sinkronisasi pendekatan operasional, pembaruan data, dan respons tanggap darurat, sekaligus mencerminkan hubungan bilateral yang seimbang, harmonis, dan saling menguntungkan dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan.

Hasil nyata dari kegiatan ini mencakup: (1) penyusunan dan pembaruan Protokol Operasional Bersama (SOP) dalam menangani kasus lintas batas, khususnya terkait penindakan terhadap pelaku kejahatan yang melintasi yurisdiksi hukum; (2) penguatan mekanisme pertukaran informasi intelijen melalui jalur komunikasi langsung antar kepolisian (*police-to-police*), yang dinilai lebih efisien daripada saluran diplomatik resmi atau *interpol*; dan (3) perumusan rencana patroli terkoordinasi di kawasan perbatasan darat dan laut, terutama di wilayah rawan seperti Entikong, Nunukan, dan perairan Sabah–Nunukan. Di samping itu, kunjungan timbal balik turut berkontribusi dalam membangun rasa saling percaya antar aparat serta memperkuat kohesi kelembagaan, yang menjadi fondasi utama bagi kerja sama yang sinergis dan kebijakan yang adaptif terhadap ancaman keamanan bersama.

Kedua negara juga menunjukkan kesamaan pandangan dalam mendorong peningkatan kapasitas personel, antara lain melalui pelatihan terpadu dan pertukaran pengalaman, seperti partisipasi aktif anggota POLRI dan PDRM dalam program pelatihan bersama di institusi seperti JCLEC. Selain itu, kegiatan penyusunan strategi serangan permukiman juga dilakukan untuk memberikan gambaran spesifik bahwa dalam pelaksanaan patroli lintas batas, Angkatan Bersenjata berupaya menindaklanjuti jika ada sekelompok orang mencurigakan di wilayah permukiman agar segera diamankan.

Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa latihan-latihan bersama antara Angkatan Bersenjata Indonesia dan Malaysia terus berfokus pada meningkatkan kemampuan tempur, meningkatkan koordinasi dan kerja sama, serta mempererat hubungan bilateral antara kedua negara di wilayah perbatasan.

Patroli Bersama di Lintas Batas Darat

Operasi bersama menekankan pada pedoman SOP yang telah ditetapkan dengan harapan dapat meningkatkan hubungan kerjasama yang lebih diplomatik kedepannya (Inventori, 2018). Selain forum pertemuan dan kunjungan timbal balik, pelaksanaan patroli darat merupakan salah satu program prioritas yang dijalankan oleh Joint Police Cooperation Committee (JPCC) Indonesia–Malaysia. Patroli ini menjadi penting karena perbatasan darat antara kedua negara dikenal sebagai jalur strategis sekaligus rentan dalam peredaran dan penyelundupan narkoba oleh jaringan kejahatan transnasional. Meskipun secara resmi hanya terdapat tiga pos lintas batas yang diakui, terdapat sekitar 82 jalur tikus atau jalur tidak resmi yang tersebar di sepanjang perbatasan, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Kondisi ini menjadikan kawasan perbatasan, terutama daerah Entikong, sebagai titik rawan yang kerap dimanfaatkan sebagai rute utama penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Kemudahan akses antarwilayah juga menambah kompleksitas tantangan keamanan yang dihadapi.

JPCC berperan aktif dalam memfasilitasi pelaksanaan operasi gabungan antarlembaga yang fokus pada penanganan penyelundupan narkoba lintas batas. Operasi ini disusun dan dijalankan oleh Tim Perancang Operasi Kepolisian (TPOK) dengan pendekatan strategis dan terkoordinasi. Patroli bersama yang dilakukan secara berkala di daerah-daerah rawan seperti Entikong, Nunukan, dan Sebatik terbukti efektif dalam menekan angka pelanggaran perbatasan. Operasi ini melibatkan unit-unit khusus dari kepolisian kedua negara dengan mekanisme rotasi personel dan dukungan sistem komunikasi terintegrasi. Bahkan, di sejumlah lokasi tertentu, patroli turut melibatkan elemen militer, petugas imigrasi, dan bea cukai, sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam menjaga kedaulatan wilayah dan meminimalkan ancaman kejahatan lintas negara.

Hasil yang diperoleh selama pelaksanaan patroli gabungan pada periode ini menunjukkan beberapa capaian penting. Pertama, terdapat peningkatan efektivitas dalam mendeteksi dan mencegah upaya penyelundupan, di mana sejumlah kasus penyelundupan narkoba dan barang terlarang berhasil digagalkan, khususnya di wilayah rawan seperti Kalimantan Barat. Kedua, patroli langsung di lapangan mampu menekan secara signifikan aktivitas pelintas batas ilegal, sekaligus memberikan efek preventif melalui peningkatan risiko hukum bagi para pelaku. Ketiga, kegiatan ini turut mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan interoperabilitas antara aparat kedua negara, melalui pertukaran pengalaman operasional, penguatan pemahaman lintas budaya, serta harmonisasi prosedur standar yang mendukung efektivitas kerja sama lintas batas.

Pengujian Fungsionalitas Komunikasi

Dalam menghadapi tantangan keamanan di era digital, JPCC mendorong integrasi sistem komunikasi digital dan basis data bersama guna mempercepat pertukaran informasi lintas negara secara real-time. Meskipun belum sepenuhnya terintegrasi, upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia dan Malaysia dalam membangun sistem keamanan berbasis teknologi. Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, kedua negara secara aktif melakukan uji coba komunikasi digital untuk memperkuat koordinasi kepolisian di wilayah perbatasan, termasuk melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi cepat. Kawasan seperti Jagoi Babang, yang hanya memiliki Pos Lintas Batas tanpa gerbang resmi, menjadi salah satu titik rawan

akibat lemahnya pengawasan dan banyaknya jalur tikus yang kerap dimanfaatkan pelaku penyelundupan, termasuk melalui area perkebunan sawit di sekitarnya.

Capaian utama dari implementasi uji coba komunikasi lintas batas mencakup: (1) Terjalinnya konektivitas langsung antara personel POLRI dan PDRM di pos-pos perbatasan, menggantikan ketergantungan pada mekanisme diplomatik yang lambat; (2) Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan patroli gabungan serta penanganan kejadian di wilayah perbatasan, termasuk penindakan terhadap pelintas ilegal dan gangguan sosial berskala kecil; (3) Teridentifikasi hambatan teknis dan geografis dalam penerapan sistem komunikasi waktu nyata, seperti lemahnya jaringan di daerah terpencil dan keterbatasan sarana pendukung.

Pertukaran Informasi

Pertukaran informasi antara POLRI dan PDRM merupakan elemen penting dalam mendukung kerja sama penanggulangan kejahatan lintas negara, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Praktik ini telah berlangsung bahkan sebelum pembentukan Joint Police Cooperation Committee (JPCC), dengan pijakan awal dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 19 Mei 2005 di Bali. Mekanisme pertukaran informasi dilakukan melalui pendekatan *police to police*, tanpa keterlibatan pihak ketiga, guna menjamin kerahasiaan dan kecepatan akses terhadap data. Informasi disampaikan baik melalui jalur resmi seperti Interpol maupun secara langsung dalam konteks operasional, termasuk saat patroli gabungan dan kunjungan kerja, guna meningkatkan efektivitas deteksi serta penindakan terhadap pelaku kejahatan lintas batas.

Dalam praktiknya, saluran komunikasi yang terkoordinasi ini menjadi strategi kunci dalam mempercepat proses identifikasi pelaku dan pola pergerakan kejahatan transnasional, termasuk kasus penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, serta pelanggaran keimigrasian. Kolaborasi ini memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan sistem pengawasan dan penegakan hukum di wilayah rawan perbatasan, serta menciptakan pola respons terpadu yang adaptif terhadap dinamika ancaman keamanan. Transparansi dan kesinambungan pertukaran data antara POLRI dan PDRM menjadi fondasi krusial bagi keberlanjutan kerja sama bilateral yang efektif dan berorientasi pada hasil.

Pertukaran informasi antara POLRI dan PDRM telah menghasilkan sejumlah capaian strategis dalam penanganan kejahatan lintas negara. Pertama, adanya kemampuan deteksi dini terhadap aktivitas penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia melalui jalur tidak resmi, berkat akses informasi yang cepat dan akurat. Kedua, kerja sama ini turut mendorong keberhasilan pengungkapan jaringan kejahatan terorganisir, terutama yang beroperasi di kawasan rawan seperti jalur perkebunan sawit dan “jalan tikus” di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Sabah/Sarawak. Ketiga, data yang diperoleh dari kedua institusi menjadi dasar pelaksanaan operasi gabungan, yang mencakup penangkapan, deportasi, serta bentuk penegakan hukum lainnya. Keempat, pertukaran ini turut memperkuat kapasitas personel melalui peningkatan pemahaman terhadap modus-modus kejahatan terkini, sehingga mendukung kesiapsiagaan aparat di lapangan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pertukaran informasi tidak terlepas dari sejumlah tantangan, seperti perbedaan sistem pengelolaan data, keterbatasan akses komunikasi di wilayah terpencil, serta sensitivitas terhadap informasi rahasia. Untuk menjawab hambatan

tersebut, JPCC mendorong harmonisasi prosedur melalui penyusunan SOP bersama dan pengembangan sistem komunikasi yang interoperabel. Upaya ini tidak hanya bertujuan memperkuat koordinasi teknis antar institusi, tetapi juga membentuk fondasi kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika ancaman keamanan di kawasan perbatasan.

Pertukaran Personil

Kegiatan pertukaran personel antara POLRI dan PDRM telah memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kapasitas dan efektivitas kerja sama lintas batas. Pertama, program ini memperkuat kompetensi teknis personel melalui pembelajaran langsung terhadap prosedur operasional dalam menangani kasus transnasional seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan pelintas batas ilegal. Selain itu, pertukaran ini juga membangun pemahaman bersama dan kepercayaan timbal balik antar aparat, yang menjadi dasar penting dalam menciptakan kerja sama yang harmonis dan minim miskomunikasi di lapangan. Melalui pengalaman lintas budaya dan interaksi langsung, masing-masing pihak memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika kerja dan karakteristik kelembagaan mitra mereka.

Selanjutnya, program ini turut mendorong sinkronisasi standar operasional antar kedua negara, terutama dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan hukum di perbatasan. Penyesuaian SOP yang dilakukan melalui interaksi langsung menghasilkan prosedur yang lebih selaras, sehingga meningkatkan efektivitas operasi gabungan serta mempercepat proses pertukaran informasi intelijen. Selain itu, pelaksanaan program ini juga menyediakan umpan balik berharga bagi JPCC dalam menyusun evaluasi dan perencanaan strategis ke depan. Salah satu temuan penting dari kegiatan ini adalah perlunya pengaturan ulang durasi penugasan agar hasil yang diperoleh lebih optimal dan berkelanjutan.

Pelatihan Kepolisian di JCLEC

JCLEC (Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation) merupakan pusat pelatihan penegakan hukum berstandar internasional yang didirikan melalui kemitraan strategis antara Indonesia dan Australia. Berlokasi di Semarang dan diresmikan pada tahun 2004, lembaga ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan lintas negara. Di bawah naungan Lembaga Pendidikan POLRI, JCLEC menyediakan program pelatihan kolaboratif yang mendukung profesionalisme dan kompetensi teknis personel. Pemerintah Australia turut mendukung secara finansial sejak awal pendiriannya, baik untuk pembangunan fasilitas maupun untuk keberlanjutan operasional tahunan.

Dalam konteks kerja sama bilateral, Joint Police Cooperation Committee (JPCC) antara POLRI dan PDRM selama 2022–2024 telah menunjukkan hasil nyata dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Inisiatif seperti pertukaran informasi intelijen, patroli bersama, pelatihan terpadu, serta diplomasi keamanan aktif telah mempersempit ruang gerak kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia. Tak hanya berdampak pada aspek keamanan, kerja sama ini juga berkontribusi langsung pada peningkatan rasa aman dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam hal harmonisasi hukum, integrasi teknologi informasi, dan efektivitas koordinasi antarinstansi. Diperlukan penyusunan protokol

operasional bersama, peningkatan pelatihan untuk seluruh lini aparat (termasuk intelijen dan analis), serta pemanfaatan sistem komunikasi digital yang aman dan real-time. Selain itu, penguatan patroli gabungan dan pelibatan masyarakat perbatasan dalam program sosial-ekonomi menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem keamanan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, kerja sama JPCC telah membuktikan pentingnya kolaborasi kepolisian lintas negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan kawasan perbatasan.

Implementasi Edukasi Pertukaran Informasi Intelijen

Pertukaran informasi intelijen merupakan salah satu upaya penting dalam pendekatan sasaran JPCC POLRI-PDRM dalam naungan GBC Malindo untuk mengatasi masalah keamanan lintas batas, terutama terkait dengan aktivitas ilegal seperti perdagangan narkoba dan kegiatan ilegal lainnya. GBC Malindo secara berkala menghasilkan rumusan-rumusan baru yang dapat dibahas dan diterapkan pada pertemuan tahunan GBC Malindo. Salah satu gagasan terbaru yang diusulkan adalah gagasan *Our Eyes*, yang bertujuan untuk meningkatkan pertukaran informasi intelijen antara kedua negara. Gagasan *Our Eyes* menjadi payung kerjasama dalam pertukaran pengetahuan intelijen, dan ini juga berhubungan dengan pembahasan draft Defence Cooperation Agreement (DCA). Melalui kerjasama ini, kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan mekanisme dan pelaksanaan pertukaran informasi intelijen. Hal ini diatur sesuai dengan tahapan proses yang telah ditetapkan dalam hasil sidang ke-64 COCC Malindo, dengan penekanan khusus pada fungsi Tim Perancang Intelijen (TPI).

Fungsi TPI adalah melakukan pengawasan secara intensif terhadap kegiatan ilegal yang terjadi baik di darat maupun laut. TPI bekerja untuk melakukan koordinasi optimal dan berkesinambungan antara aparat intelijen dengan pihak keamanan lainnya. Tujuan dari kerjasama ini adalah agar kegiatan ilegal dapat dicegah dan diantisipasi secara efektif.

Melalui pertukaran informasi intelijen dan kerjasama yang baik antara kedua negara, diharapkan keamanan di wilayah perbatasan dapat ditingkatkan, dan upaya bersama dalam memberantas aktivitas ilegal dapat berhasil dengan lebih efektif. Gagasan *Our Eyes* dan peran TPI menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kerja sama keamanan antara Angkatan Bersenjata Indonesia dan Malaysia di bawah GBC Malindo, dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil di kawasan perbatasan.

Kerjasama intelijen pemantauan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia telah membawa manfaat yang signifikan bagi kedua negara dan masyarakat di wilayah perbatasan. Upaya bersama dalam mengatasi masalah keamanan dan meningkatkan kerja sama bilateral telah membuka jalan bagi peningkatan kesejahteraan dan stabilitas di kawasan perbatasan.

Dampak positif dirasakan oleh secara eksplisit, seperti hubungan diplomatik yang terjalin semakin baik, sehingga semakin memperkuat hubungan bilateral dan saling percaya di antara mereka. dan perolehan informasi yang akurat memungkinkan kedua negara untuk memperoleh informasi yang akurat tentang aktivitas ilegal dan ancaman di perbatasan.

Pertukaran informasi ini memainkan peran penting dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan narkoba dan aktivitas ilegal lainnya. Melalui meningkatnya kerja sama intelijen dan pemantauan di perbatasan, faktor keamanan meningkat. Kehadiran aparat keamanan yang lebih efektif dan informasi yang tepat waktu membantu mengurangi risiko kejahatan lintas batas dan memastikan wilayah perbatasan menjadi lebih aman.

Disamping itu, Dampak positif lainnya adalah peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat di perbatasan. Dengan wilayah yang lebih aman, investasi dan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan akses ke layanan dan fasilitas sosial. Dampak positif lainnya adalah peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat di perbatasan. Dengan wilayah yang lebih aman, investasi dan pembangunan dapat lebih mudah dilakukan, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan akses ke layanan dan fasilitas sosial.

KESIMPULAN

Rapat dan kunjungan timbal balik antara POLRI dan PDRM melalui mekanisme JPCC berperan penting dalam memperkuat sinergi, kepercayaan, dan koordinasi lintas batas antara Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi kejahatan transnasional. Kegiatan ini menghasilkan langkah konkret seperti penyusunan SOP bersama, penguatan jalur pertukaran informasi intelijen, serta perencanaan patroli terkoordinasi di wilayah rawan perbatasan. Selain itu, pelibatan aktif dalam pelatihan bersama dan strategi pengamanan wilayah permukiman menunjukkan bahwa kedua negara tidak hanya fokus pada aspek operasional, tetapi juga pada peningkatan kapasitas personel dan ketahanan kawasan. Upaya ini memperkuat fondasi kerja sama keamanan yang adaptif, responsif, dan saling menguntungkan dalam menjaga stabilitas kawasan perbatasan. pelaksanaan patroli gabungan antara Indonesia dan Malaysia berhasil menunjukkan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan keamanan perbatasan. Keberhasilan ini tercermin dari peningkatan efektivitas pencegahan penyelundupan, penurunan aktivitas pelintas batas ilegal, serta penguatan kapasitas dan koordinasi antar aparat melalui harmonisasi prosedur dan pertukaran pengalaman operasional. Pertukaran pengalaman dilakukan dengan prinsip non-intervensi, yang berarti kedua negara berkomitmen untuk tidak campur tangan dalam urusan internal satu sama lain. Selain itu, pertukaran informasi ini didasari oleh saling kepercayaan antara POLRI dan PDRM dalam melakukan penyelidikan, penyergapan, serta penetapan tersangka dan barang-barang bukti terkait perdagangan ilegal. Kerjasama dan koordinasi yang baik di antara semua pihak terkait merupakan langkah penting dalam mengatasi tantangan keamanan di wilayah perbatasan dan memastikan upaya pencegahan dan penindakan kegiatan ilegal, termasuk perdagangan narkoba, dapat dilakukan secara efektif. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan wilayah perbatasan dapat menjadi lebih aman dan stabil serta memberikan manfaat bagi kedua negara dan masyarakat di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Huda, M., & Juwita, J. (2024). Peran polisi dalam penanggulangan peredaran narkoba melalui jalur perairan: Upaya pre-emptif, preventif, dan represi. *Postulat*, 2(1). <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1461>
- Amsir, A. A. (2021). Perjanjian Westphalia dan momentum pendirian negara modern. *Sulesana*, 15(1).
- Ardivitianto, Y. (2015). Perkembangan musik rock di kota Malang tahun 1970-2000-an: Kajian globalisasi dan eksistensi sosial budaya. *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(1).

- Edylia Putri, N., & Rizaldi, A. (2021). Perkembangan koperasi di Indonesia dalam menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 di era globalisasi. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 1(6). <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i6.85>
- Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1). <https://doi.org/10.18196/hi.71122>
- James, J., & Proulx, J. (2016). The modus operandi of serial and nonserial sexual murderers: A systematic review. *Aggression and Violent Behavior*, 31, 46-63. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2016.09.006>
- Kurniawan, R. N. K. (2018). Strategi promosi kesehatan terhadap upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *MPPKI (Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia): The Indonesian Journal of Health Promotion*, 1(1), 13-18. <https://doi.org/10.31934/mppki.v1i1.132>
- Murtiwiidayanti, S. Y. (2018). Sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(1), 23-34.
- Puspita, F. (2023). Globalisasi dan konstruksi budaya Melayu: Studi tentang perkembangan, pengaruh Islam dan ancaman globalisasi. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 5(3), 112-125. <https://doi.org/10.54783/jin.v5i3.768>
- Putra Y, V. F. (2021). Modus operandi tindak pidana phising menurut UU ITE. *Jurist-Diction*, 4(6), 2247-2266. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31857>
- Saputro, M. T. (2020). Perbandingan pendirian dan sistem hukum perusahaan antar negara Indonesia dan Kamboja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4), 578-585. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.2077>
- Setiawan, T., & Risnandar, A. (2019). Negara modern, dan utopia negara khilafah(?). *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 2(2), 45-62. <https://doi.org/10.47076/jkpis.v2i2.14>
- Situni, F. A. W. (2017). Perjanjian internasional dan suksesi negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(5), 412-428. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no5.1157>
- Sujati, B. (2018). Sejarah perkembangan globalisasi dalam dunia Islam. *Nalar: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 2(2), 87-98. <https://doi.org/10.23971/njppi.v2i2.969>
- Wulandari, L., Umar, D. D., Septiani, D., Iskandar, H. H., Safina, M., & Haq, V. A. (2022). Analisis pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi nuklir terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan (sustainable environment). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 1(1), 36-50.
- Zarisnov Arafat, & Muhammad Gary Gagarin Akbar. (2019). Politik hukum dalam pembaharuan peraturan ekstradisi di Indonesia dihubungkan dengan United Nations Model Treaty on Extradition of 1990. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-92. <https://doi.org/10.36805/jjih.v4i1.640>

